

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki permasalahan terhadap ketenagakerjaan adalah Indonesia. Ketenagakerjaan sendiri dianggap sebagai suatu masalah yang signifikan karena antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding. Hal inilah yang mendasari perlunya suatu pembangunan ekonomi dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan suatu daerah maupun suatu negara selalu berkaitan erat dengan dari interaksi beberapa variabel, seperti modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan lain lain. Pasti nya pembangunan ekonomi ini selalu membutuhkan peran manusia sebagai tenaga kerja, sehingga perlunya tambahan lapangan pekerjaan setiap tahun dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga suatu daerah mampu menyerap tenaga kerja yang lebih signifikan agar kemakmuran suatu daerah atau negara dapat tercapai.

Pasar tenaga kerja itu seperti halnya pasar lainnya dalam perekonomian, yaitu dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun yang membedakan pasar tenaga kerja dengan sebagian besar pasar lainnya adalah pada permintaan tenaga kerja yang merupakan tenaga kerja turunan (derived demand) dimana permintaan akan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya. Oleh karena itu, permasalahan pada ketenagakerjaan bukan lagi merupakan masalah kecil bagi suatu negara karena dimensi pada ketenagakerjaan dilihat dari aspek ketersediaan lapangan pekerjaan, aspek produktivitas dan lainnya.

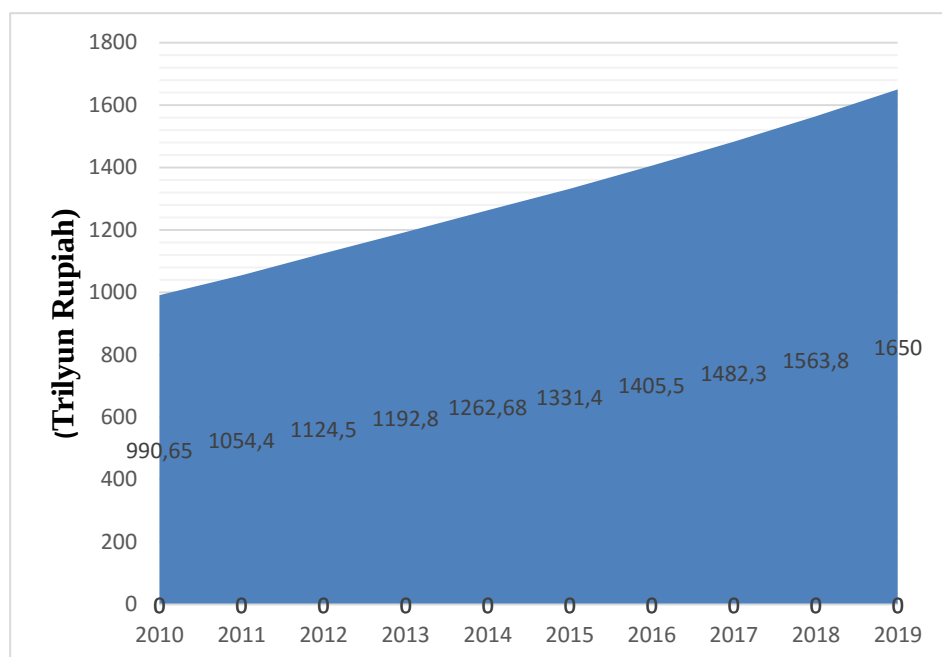
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa

Timur, pada tahun 2014 penduduk Jawa Timur berjumlah 38.610.202 jiwa dengan penduduk usia kerjanya berjumlah 29.578.682 orang. Dari penduduk usia kerja ini, angkatan kerjanya berjumlah 20.149.998 orang dengan penduduk yang bekerja sebanyak 19.306.508 orang (95,81%), sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 843.490 orang. Dari data tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengangguran merupakan permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya kualitas angkatan kerja, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan rendahnya motivasi serta jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Pada UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan buruh, menjelaskan mengenai pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia yang seluruhnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembangunan nasional, aspek yang sangat berpengaruh adalah tenaga kerja karena tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, maka perlu untuk diadakannya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi.

Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu cerminan dari pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2018 mencapai Rp 2.189,78 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp

1.563,76 triliun. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,50%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,63%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,61%). Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57 % dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistika

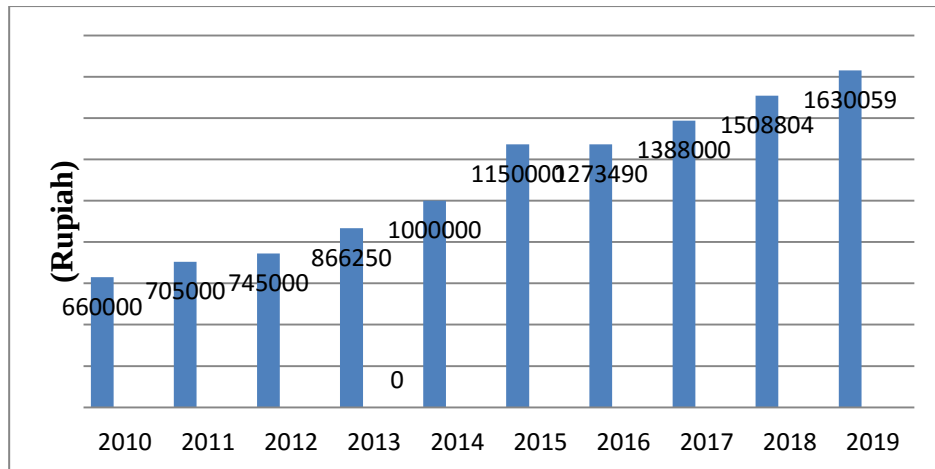
Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Povinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Pada Tahun 2010-2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui potensi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Peranan kota maupun provinsi dalam mendukung perekonomian nasional sangat besar tetapi pada kenyataannya terkadang

tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, hal tersebut merupakan salah satu fenomena perekonomian, sehingga pastinya perlu untuk menggali potensi perekonomian suatu daerah maupun provinsi dalam merangsang kemajuan aktivitas ekonomi agar pembangunan ekonomi pada suatu wilayah menjadi lebih potensial untuk menyumbang perekonomian yang lebih besar di tingkat nasional.

Di berbagai negara, kebijakan penetapan upah minimum sangat penting untuk mengatasi salah satu dari masalah ketenagakerjaan. Pada pasal 30 ayat 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah yaitu “....hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Untuk memastikan kesejahteraan pekerja/buruh maka pemerintah merancang peraturan yang biasa dinamakan Upah Minimum.

Perbedaan pandangan mengenai besarnya upah terkadang dapat menyebabkan keresahan di kalangan tenaga kerja dan mendorong para tenaga kerja tersebut untuk melakukan demonstrasi guna meminta kenaikan upah setiap tahunnya, Jika keadaan ini terus berlangsung tentu pemberi kerja kesulitan memenuhi tuntutan tenaga kerja, akibatnya akan banyak terjadi PHK yang mengakibatkan semakin bertambahnya angka pengangguran sehingga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistika (diolah) dan Kementerian Ketenagakerjaan

Gambar 1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2010 sampai 2019

Gambar 1.2 menunjukkan data UMP yang ada di Jawa Timur. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, Provinsi Jawa Timur belum menetapkan UMP hingga tahun 2017 sehingga Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur mulai dari tahun 2010 diambil berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah yang ada di kota pada Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017 Jawa Timur baru pertama kali mengeluarkan surat keputusan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 1.388.000 yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur pada tahun tersebut, akan tetapi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur masih ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah di Jawa Timur, yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan. Hal tersebut memicu Serikat Pekerja pada tahun itu untuk melakukan demonstrasi, penyebabnya tidak lain karena Upah Minimum Provinsi tidak sesuai dengan Kebutuhan Layak Hidup yang ada di Provinsi Jawa Timur. Namun, Gubernur Provinsi Jawa Timur saat itu menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi pada tahun 2017 hanya bersifat Administratif. Tentunya, Serikat Pekerja disini berharap agar penetapan tersebut mempertimbangkan

Kebutuhan Layak Hidup yang ada di Provinsi serta meninjau tingkat Inflasi guna mendapatkan Upah Minimum Provinsi yang sesuai.

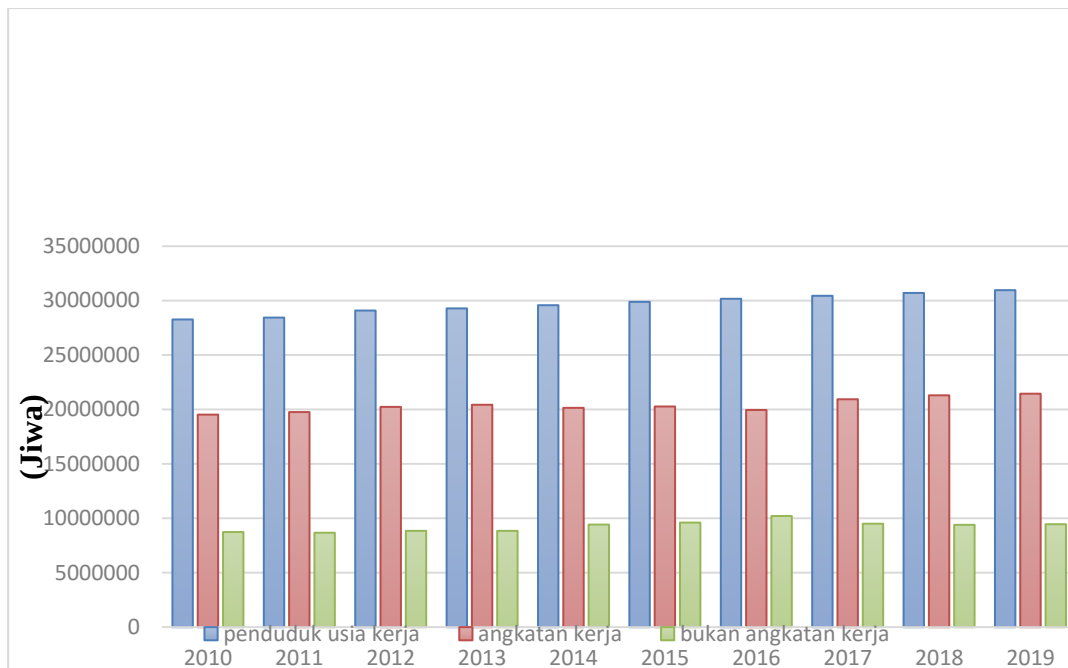
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor eksternal seperti Kebutuhan Layak Hidup (KHL) dan juga Inflasi yang terjadi. Tentunya kenaikan UMP akan sebanding dengan kenaikan UMK pada kota-kota tertentu di Jawa Timur. Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dianggap lebih spesifik daripada UMP, hal tersebut dicontohkan jika suatu kota belum memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maka ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku, sedangkan jika kabupaten/kota sudah menerapkan UMK yang jumlahnya cenderung lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP), maka yang diberlakukan adalah UMK. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2017 menyatakan bahwa tiap perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/kota.

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah yang terdiri dari atas perwakilan serikat kerja, pengusaha, pemerintah dan pihak ahli / pakar, pengamat dan pihak akademis. Dalam penetapan UMP/ UMK, dewan pengupahan daerah melakukan survei pasar mengenai harga terhadap 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), setelah itu dewan pengupahan memberikan rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam menetapkan Upah Minimum.

Ketentuan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) per tahun tidak dapat disamaratakan, karena bergantung dari sejumlah indikator seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja di daerah masing-masing. Keadaan

ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek persediaan dan aspek kebutuhan, idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, sehingga tidak ada pengangguran. Tetapi dari tahun ke tahun kondisi normal yang diharapkan tersebut belum pernah terjadi, jumlah pengangguran setiap tahunnya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga keseimbangan atas lapangan pekerjaan dan juga jumlah penduduk sangat tidak signifikan sehingga terjadinya banyak pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan.

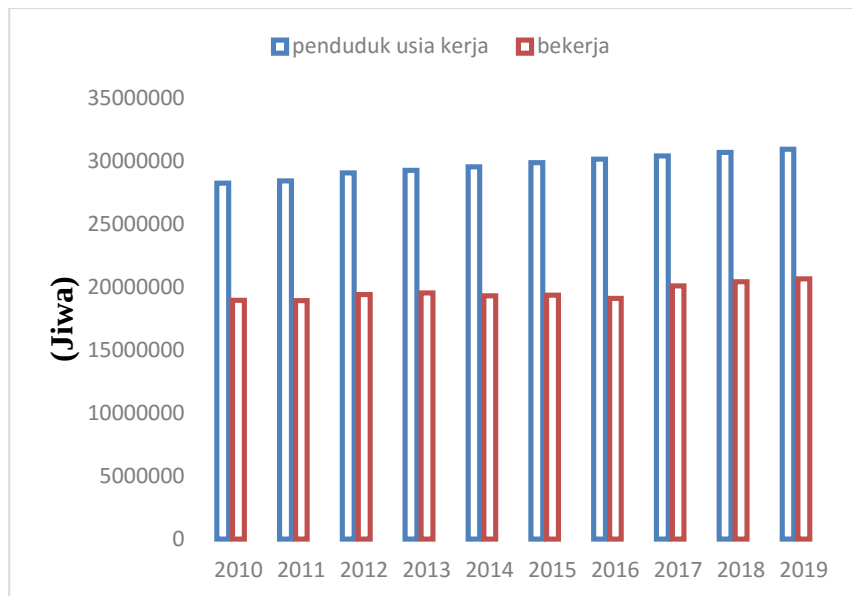
Peranan penting penduduk dalam perekonomian ada dua yaitu dalam konteks pasar berada disisi permintaan dan penawaran. Disisi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen, sedangkan disisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen (Dumairy, 1999). Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif didukung oleh kekayaan alam yang beraneka ragam merupakan modal dasar dalam pembangunan. Masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar dinegara berkembang menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena, disatu pihak pertambahan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya tapi disisi lain, kemampuan negara untuk menciptakan kesempatan kerja menjadi sangat terbatas (Sukirno,2006).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, sakernas 2010-2019 (data diolah)

Gambar 1.3 Gambaran ketenagakerjaan di Jawa Timur (2010-2019)

Penduduk usia kerja yang ada di Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur juga mengalami kenaikan yang signifikan sehingga penduduk usia kerja juga selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Melonjaknya penduduk suatu wilayah selalu diiringi dengan melonjaknya jumlah angkatan kerja, hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks yaitu akan menyebabkan pengangguran. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena belum meratanya pembangunan ekonomi yang ada pada suatu wilayah sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang cepat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2010-2019

Gambar 1.4 Perbandingan Penduduk Usia Kerja dan Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019

Gambar 1.4 ditunjukkan perbandingan pada penduduk usia kerja dengan penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Menurut gambar diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan tidak dapat menampung banyaknya jumlah penduduk yang ada, hal tersebut tercermin pada data dimana perbandingannya kurang lebih sekitar 10.000.000 penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aspek yaitu antara lain menempuh pendidikan, menganggur dan juga lain – lain.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan guna mengimbangi jumlah angkatan kerja yang tersedia, hal ini berguna untuk mengurangi tingkat pengangguran pada suatu wilayah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pada suatu wilayah (PDRB). Salah satu sumber utama suatu kemiskinan pada suatu wilayah maupun negara adalah pemborosan sumber daya serta ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan pertumbuhan penduduk sehingga tercipta

banyaknya pengangguran yang mengakibatkan kesejahteraan menurun sehingga dapat pula menciptakan suatu kemiskinan.

1.2 Ringkasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai tahun 2019. Variabel bebas yang digunakan berupa PDRB, Upah Minimum dan juga jumlah penduduk, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah jumlah tenaga kerja. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Ketenagakerjaan dimana data yang digunakan adalah data periode tahun 2010-2019 berupa data panel.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur ?
- b. Apakah Upah Minimum memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur ?
- c. Apakah Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur.
- b. Untuk menganalisis apakah Upah Minimum memiliki pengaruh

terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja di Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung :

- 1 Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam membentuk pola pikir yang akademis dan teoritis sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas.

- 2 Bagi Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bahan evaluasi bagi Provinsi Jawa Timur mengenai seberapa besar pengaruh dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap jumlah Tenaga Kerja.

- 3 Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan sumber referensi untuk menganalisis jauh lebih dalam mengenai sub tema yang sama.

- 4 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan akan menguraikan mengenai latar belakang mengenai gambaran umum tentang terbentuknya penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisikan perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori-teori dari para teoritis dan praktisi terdahulu tentang pengetahuan yang terkait dalam penelitian. Definisi – definisi atau pengertian yang terkait dengan penelitian akan dijelaskan di dalam bab dua. Bab ini menjelaskan pula hipotesis penelitian, model analisis dan kerangka berfikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan segala aspek yang diperlukan untuk membuat penelitian menjadi utuh. Bab ini mencakup beberapa aspek, antara lain, pembahasan tentang pendekatan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, identifikasi variabel, definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, prosedur penentuan sampel serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan melalui analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan dan saran yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dan menjawab berdasarkan hasil analisis